



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
16. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga.
17. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
18. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
19. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga.

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung.
21. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
22. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
24. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
25. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengalokasian Dana Kampung.
2. Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADK.
2. Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADK.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pengalokasian ADK pada Kampung yang dituangkan dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Penghitungan ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (Z1) + (Z2) + (Z3) + (Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung

Z1 = Jumlah Perangkat Kampung dikalikan besaran SILTAP

Z2 = Jumlah BPK dikalikan besaran Tunjangan

Z3 = Jumlah RT dikalikan besaran Insentif

Z4 = Penyelenggaraan Kewenangan Kampung

BAB IV
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 61.053.646.053,- (Enam Puluh Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat, tunjangan BPK dan Insentif RT sebesar Rp. 57.063.448.800,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- b. ADK Non Siltap Sebesar Rp. 3.990.197.253,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan kampung berdasarkan hasil musyawarah kampung.
- c. Besaran Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung Tahun 2021 berdasarkan total besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGHASILAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian kesatu
Jenis penghasilan

Pasal 6

- (1) Penghasilan Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Jaminan sosial
 - c. Penerimaan lain yang sah
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKam.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Penghasilan tetap dan tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung, dan perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADK.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Kampung : Rp.2.426.640,-/ bulan
 2. Sekretaris Kampung : Rp.2.224.420,-/ bulan
 3. Kepala Urusan/Seksi : Rp.2.022.200,-/ bulan
 4. Rukun Keluarga : Rp.575.000,-/ bulan
- (3) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung yang bersumber dari adk non siltap dan Pendapatan Asli Kampung (PAK).

Pasal 8

- (1) Bagi Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (2) Bagi Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima Tunjangan Kepala Kampung maksimal sebesar Rp.1.500.000,- tiap bulan yang bersumber dari adk non siltap dan Pendapatan Asli Kampung (PAK);
- (3) Bagi Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (4) Bagi sekretaris Kampung yang berstatus PNS dapat menerima Tunjangan Perangkat Kampung maksimal sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulan yang bersumber dari adk non siltap dan Pendapatan Asli Kampung (PAK);.

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan berikutnya setelah penetapan.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian ketiga Jaminan sosial

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan Jaminan sosial
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Penerimaan lain yang sah

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Honorarium pengelola keuangan Kampung
- b. Honorarium pengurus dan pembantu Pengelola aset Kampung
- c. Honorarium Penyusunan dokumen Perencanaan Kampung.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan kampung dapat diberikan:
 - a. Honorarium PKPKD, dan
 - b. Honorarium PPKD
- (2) Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa maksimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam keputusan Kepala Kampung.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada sekretaris kampung maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kasi dan Kaur Kampung sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa maksimal sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam keputusan Kepala Kampung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Kampung dan Staf Kampung dalam kedudukannya sebagai Pengurus dan Pembantu pengelola aset kampung dapat diberikan honorarium berupa :
 - a. Honorarium pengurus pengelola aset kampung, dan
 - b. Honorarium pembantu pengelola asset Kampung.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang dituangkan dalam keputusan Kepala Kampung.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan honorarium penyusunan dokumen perencanaan Kampung antara lain :
 - a. Honorarium Pembina maksimal sebesar Rp.1.200.000,- /bulan (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 bulan
 - b. Honorarium ketua tim maksimal sebesar Rp.1.000.000,- /bulan (satu juta rupiah) selama 4 bulan
 - c. Honorarium sekretaris maksimal sebesar Rp.800.000,- /bulan (delapan ratus ribu rupiah) selama 4 bulan
 - d. Honorarium anggota maksimal sebesar Rp.700.000,-/bulan (tujuh ratus ribu rupiah) selama 4 bulan

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN DAN INSENTIF

Bagian kesatu
Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 14

- (1) BPK berhak menerima Tunjangan yang dianggarkan dalam APBKam;
- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh BPK adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Rp.750.000,- /Bulan
 2. Wakil Ketua : Rp.700.000,- /Bulan
 3. Sekretaris : Rp.650.000,- /Bulan
 4. Anggota : Rp.600.000,- /Bulan
- (3) Selain mendapat Tunjangan, BPK juga dapat diberikan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung;

Bagian kedua
Insentif Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) RT berhak menerima Insentif yang dianggarkan dalam APBKam;
- (2) Besaran Insentif yang diterima oleh RT disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung dengan batasan maksimal sebesar : Rp.500.000,- / bulan
- (3) Selain mendapatkan Insentif Rukun Tetangga (RT), dapat diberikan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.

BAB VII
BESARAN ANGGARAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) NON SILTAP

Pasal 16

- (1) Masing-masing Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang menerima ADK Non Siltap yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan Kampung berdasarkan hasil musyawarah Kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung antara lain :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
 2. Pembangunan Kampung

3. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
4. Pemberdayaan Masyarakat Kampung
5. Penanggulangan bencana alam

(2) Besaran anggaran yang diterima masing-masing kampung se-Kabupaten Tulang Bawang untuk penyelenggaraan Kewenangan Kampung adalah sebesar **Rp.27.144.199,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) per Kampung sebanyak 147 Kampung.

BAB VIII

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 17

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;
- (2) Penyaluran untuk penghasilan Tetap, Tunjangan BPK, Insentif RT dilakukan secara Non Tunai oleh Pemerintah Kampung kepada masing-masing yang berhak menerima.
- (3) Penyaluran Dana ADK dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Persentase penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana penjelasan ayat (3) tidak termasuk dana penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan BPK dan Insentif RT.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021
NOMOR :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
 PER-KAMPUNG SE-KABUPATEN TULANG BAWANG
 TAHUN 2021

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	BANJAR DEWA	187,378,320	174,000,000	27,144,199	388,522,519
2	TUNGGAL WARGA	208,078,320	332,400,000	27,144,199	567,622,519
3	WARGA INDAH JAYA	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
4	WARGA MAKMUR JAYA	194,278,320	222,000,000	27,144,199	443,422,519
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	188,285,280	434,400,000	27,144,199	649,829,479
6	MORIS JAYA	201,178,320	284,400,000	27,144,199	512,722,519
7	TRI MULYA JAYA	180,478,320	188,400,000	27,144,199	396,022,519
8	TRI MUKTI JAYA	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
9	BANJAR AGUNG	235,911,120	194,400,000	27,144,199	457,455,319
10	TRI DARMA WIRA JAYA	180,478,320	164,400,000	27,144,199	372,022,519
11	TRI TUNGGAL JAYA	187,378,320	352,800,000	27,144,199	567,322,519
JUMLAH		2,124,401,280	2,599,200,000	298,586,189	5,022,187,469

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	PANCA MULYA	187,378,320	156,000,000	27,144,199	370,522,519
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	194,278,320	212,400,000	27,144,199	433,822,519
3	KAHURIPAN JAYA	242,811,120	210,000,000	27,144,199	479,955,319
4	BAWANG SAKTI JAYA	208,078,320	183,600,000	27,144,199	418,822,519
5	MEKAR JAYA	173,578,320	93,600,000	27,144,199	294,322,519
6	BALAI MURNI JAYA	173,578,320	105,600,000	27,144,199	306,322,519
7	MEKAR INDAH JAYA	180,478,320	117,600,000	27,144,199	325,222,519
8	JAYA MAKMUR	180,478,320	168,000,000	27,144,199	375,622,519
9	BAWANG TIRTO MULYO	208,078,320	174,000,000	27,144,199	409,222,519
10	KARYA MURNI JAYA	173,578,320	105,600,000	27,144,199	306,322,519
JUMLAH		1,922,316,000	1,526,400,000	271,441,990	3,720,157,990

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	BUJUK AGUNG	187,378,320	200,400,000	27,144,199	414,922,519
2	RINGIN SARI	208,078,320	260,400,000	27,144,199	495,622,519
3	SUKA MAJU	187,378,320	158,400,000	27,144,199	372,922,519
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	180,478,320	188,400,000	27,144,199	396,022,519
5	PURWA JAYA	194,278,320	242,400,000	27,144,199	463,822,519
6	PENAWAR JAYA	167,585,280	248,400,000	27,144,199	443,129,479
7	AGUNG DALEM	235,911,120	176,400,000	27,144,199	439,455,319
8	AGUNG JAYA	194,278,320	212,400,000	27,144,199	433,822,519
9	SUMBER MAKMUR	180,478,320	168,000,000	27,144,199	375,622,519
10	TRI TUNGGAL JAYA	180,478,320	164,400,000	27,144,199	372,022,519
11	PENAWAR REJO	187,378,320	212,400,000	27,144,199	426,922,519
12	MEKAR JAYA	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
JUMLAH		2,284,179,600	2,358,000,000	325,730,388	4,967,909,988

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	BRATASENA ADIWARNA	201,178,320	482,400,000	27,144,199	710,722,519
2	BRATASENA MANDIRI	180,478,320	272,400,000	27,144,199	480,022,519
3	KUALA TELADAS	180,478,320	138,000,000	27,144,199	345,622,519
4	SUNGAI NIBUNG	242,578,320	704,400,000	27,144,199	974,122,519
5	SUNGAI BURUNG	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
6	TELADAS	256,611,120	254,400,000	27,144,199	538,155,319
7	MAHABANG	208,078,320	254,400,000	27,144,199	489,622,519
8	PASIRAN JAYA	228,778,320	338,400,000	27,144,199	594,322,519
9	KEKATUNG	188,285,280	278,400,000	27,144,199	493,829,479
10	PENDOWO ASRI	208,078,320	326,400,000	27,144,199	561,622,519
11	DENTE MAKMUR	201,178,320	236,400,000	27,144,199	464,722,519
12	WAY DENTE	208,078,320	220,800,000	27,144,199	456,022,519
JUMLAH		2,484,279,600	3,632,400,000	325,730,388	6,442,409,988

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	PENAWAR BARU	180,478,320	128,400,000	27,144,199	336,022,519
2	KECUBUNG MULYA	180,478,320	99,600,000	27,144,199	307,222,519
3	KECUBUNG JAYA	187,378,320	111,600,000	27,144,199	326,122,519
4	AJI JAYA KNPI	187,378,320	176,400,000	27,144,199	390,922,519
5	PENAWAR	173,578,320	90,000,000	27,144,199	290,722,519
6	BANDAR AJI JAYA	166,678,320	81,600,000	27,144,199	275,422,519
7	AJI MURNI JAYA	166,678,320	87,600,000	27,144,199	281,422,519
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	166,678,320	81,600,000	27,144,199	275,422,519
9	AJI MESIR	180,478,320	87,600,000	27,144,199	295,222,519
10	GEDUNG AJI	215,211,120	90,000,000	27,144,199	332,355,319
JUMLAH		1,805,016,000	1,034,400,000	271,441,990	3,110,857,990

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	SUKA BHAKTI	201,178,320	236,400,000	27,144,199	464,722,519
2	MAKARTI TAMA	235,678,320	332,400,000	27,144,199	595,222,519
3	MESIR DWI JAYA	180,478,320	162,000,000	27,144,199	369,622,519
4	BATU AMPAR	201,178,320	186,000,000	27,144,199	414,322,519
5	SIDO MUKTI	256,611,120	260,400,000	27,144,199	544,155,319
6	SETIA TAMA	187,378,320	114,000,000	27,144,199	328,522,519
7	SUMBER JAYA	201,178,320	138,000,000	27,144,199	366,322,519
8	MEKAR ASRI	173,578,320	108,000,000	27,144,199	308,722,519
9	SIDO MEKAR	194,278,320	188,400,000	27,144,199	409,822,519
JUMLAH		1,831,537,680	1,725,600,000	244,297,791	3,801,435,471

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	GEDUNG MENENG	340,318,080	662,400,000	27,144,199	1,029,862,279
2	BAKUNG UDIK	180,478,320	102,000,000	27,144,199	309,622,519
3	BAKUNG ILIR	173,578,320	90,000,000	27,144,199	290,722,519
4	GUNUNG TAPA	214,978,320	200,400,000	27,144,199	442,522,519
5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	228,778,320	230,400,000	27,144,199	486,322,519
6	GEDUNG BANDAR REJO	187,378,320	168,000,000	27,144,199	382,522,519
7	BAKUNG RAHAYU	180,478,320	102,000,000	27,144,199	309,622,519
8	GEDUNG MENENG BARU	180,478,320	81,600,000	27,144,199	289,222,519
9	GUNUNG TAPA ILIR	187,378,320	158,400,000	27,144,199	372,922,519
10	GUNUNG TAPA UDIK	201,178,320	144,000,000	27,144,199	372,322,519
11	GUNUNG TAPA TENGAH	187,378,320	129,600,000	27,144,199	344,122,519
JUMLAH		2,262,401,280	2,068,800,000	298,586,189	4,629,787,469

KECAMATAN : MENGGALA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	ASTRA KSETRA	180,478,320	146,400,000	27,144,199	354,022,519
2	UJUNG GUNUNG ILIR	187,378,320	244,800,000	27,144,199	459,322,519
3	TIUH TOHOU	180,478,320	170,400,000	27,144,199	378,022,519
4	KAGUNGAN RAHAYU	180,478,320	188,400,000	27,144,199	396,022,519
5	BUJUNG TENUK	180,478,320	152,400,000	27,144,199	360,022,519
JUMLAH		909,291,600	902,400,000	135,720,995	1,947,412,595

KECAMATAN : MERAKSA AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	MARGA JAYA	173,578,320	93,600,000	27,144,199	294,322,519
2	MULYO AJI	173,578,320	111,600,000	27,144,199	312,322,519
3	BINA BUMI	180,478,320	114,000,000	27,144,199	321,622,519
4	BANGUN REJO	187,378,320	114,000,000	27,144,199	328,522,519
5	KARYA BHAKTI	180,478,320	150,000,000	27,144,199	357,622,519
6	PADUAN RAJAWALI	229,011,120	180,000,000	27,144,199	436,155,319
7	SUKARAME	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
8	KECUBUNG RAYA	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
JUMLAH		1,485,459,360	1,015,200,000	217,153,592	2,717,812,952

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	LINGAI	180,478,320	140,400,000	27,144,199	348,022,519
2	LEBUH DALEM	249,711,120	170,400,000	27,144,199	447,255,319
3	KIBANG PACING	180,478,320	128,400,000	27,144,199	336,022,519
4	CEMPAKA DALAM	173,578,320	108,000,000	27,144,199	308,722,519
5	CEMPAKA JAYA	180,478,320	198,000,000	27,144,199	405,622,519
6	MENGGALA	167,585,280	182,400,000	27,144,199	377,129,479
7	KAHURIPAN DALEM	187,378,320	114,000,000	27,144,199	328,522,519
8	SUNGAJ LUAR	187,378,320	120,000,000	27,144,199	334,522,519
9	TRI MAKMUR JAYA	180,478,320	150,000,000	27,144,199	357,622,519
10	BEDAROU INDAH	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
JUMLAH		1,868,022,960	1,437,600,000	271,441,990	3,577,064,950

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	GEDUNG REJO SAKTI	229,011,120	158,400,000	27,144,199	414,555,319
2	GEDUNG HARAPAN	180,478,320	141,600,000	27,144,199	349,222,519
3	PANCA TUNGGAL JAYA	201,178,320	242,400,000	27,144,199	470,722,519
4	KARYA MAKMUR	201,178,320	156,000,000	27,144,199	384,322,519
5	PASAR BATANG	180,478,320	132,000,000	27,144,199	339,622,519
6	SUKA MAKMUR	201,178,320	156,000,000	27,144,199	384,322,519
7	WONO REJO	208,078,320	212,400,000	27,144,199	447,622,519
8	GEDUNG ASRI	201,178,320	206,400,000	27,144,199	434,722,519
9	SUMBER SARI	188,285,280	230,400,000	27,144,199	445,829,479
JUMLAH		1,791,044,640	1,635,600,000	244,297,791	3,670,942,431

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	TRI TUNGGAL JAYA	153,785,280	152,400,000	27,144,199	333,329,479
2	TRI JAYA	187,378,320	144,000,000	27,144,199	358,522,519
3	TRI REJO MULYO	187,378,320	200,400,000	27,144,199	414,922,519
4	SIDO MULYO	201,178,320	192,000,000	27,144,199	420,322,519
5	BOGATAMA	235,911,120	236,400,000	27,144,199	499,455,319
6	SIDO HARJO	187,378,320	194,400,000	27,144,199	408,922,519
7	PULO GADUNG	180,478,320	99,600,000	27,144,199	307,222,519
8	DWI MULYO	180,478,320	135,600,000	27,144,199	343,222,519
9	SIDO MAKMUR	180,478,320	132,000,000	27,144,199	339,622,519
10	WIRA AGUNG SARI	180,478,320	87,600,000	27,144,199	295,222,519
11	REJOSARI	180,478,320	108,000,000	27,144,199	315,622,519
12	TRI KARYA	180,478,320	126,000,000	27,144,199	333,622,519
13	WIRATAMA	180,478,320	164,400,000	27,144,199	372,022,519
14	SIDODADI	180,478,320	117,600,000	27,144,199	325,222,519
JUMLAH		2,596,836,240	2,090,400,000	380,018,786	5,067,255,026

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	BUMI RATU	180,478,320	188,400,000	27,144,199	396,022,519
2	MEDASARI	242,811,120	272,400,000	27,144,199	542,355,319
3	YUDHA KARYA JITU	173,578,320	152,400,000	27,144,199	353,122,519
4	GEDUNG KARYA JITU	194,278,320	278,400,000	27,144,199	499,822,519
5	HARGO MULYO	180,478,320	146,400,000	27,144,199	354,022,519
6	KARYA CIPTA ABADI	173,578,320	75,600,000	27,144,199	276,322,519
7	WONO AGUNG	187,378,320	188,400,000	27,144,199	402,922,519
8	HARGO REJO	180,478,320	164,400,000	27,144,199	372,022,519
9	KARYA JITU MUKTI	173,578,320	152,400,000	27,144,199	353,122,519
JUMLAH		1,686,637,680	1,618,800,000	244,297,791	3,549,735,471

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	BUMI DIPASENA AGUNG	249,478,320	468,000,000	27,144,199	744,622,519
2	BUMI DIPASENA JAYA	215,885,280	432,000,000	27,144,199	675,029,479
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	235,678,320	428,400,000	27,144,199	691,222,519
4	BUMI DIPASENA MULYA	291,111,120	476,400,000	27,144,199	794,655,319
5	BUMI DIPASENA UTAMA	228,778,320	398,400,000	27,144,199	654,322,519
6	BUMI DIPASENA ABADI	235,678,320	440,400,000	27,144,199	703,222,519
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	242,578,320	464,400,000	27,144,199	734,122,519
8	BUMI DIPASENA SENTOSA	194,278,320	216,000,000	27,144,199	437,422,519
JUMLAH		1,893,466,320	3,324,000,000	217,153,592	5,434,619,912

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2021			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	NON SILTAP	
1	2	3	4	5	7=3+4+5
1	RAWA RAGIL	153,785,280	182,400,000	27,144,199	363,329,479
2	GEDUNG JAYA	160,685,280	194,400,000	27,144,199	382,229,479
3	SUMBER AGUNG	173,578,320	164,400,000	27,144,199	365,122,519
4	PANGGUNG MULYA	187,378,320	144,000,000	27,144,199	358,522,519
5	ANDALAS CERMIN	201,178,320	224,400,000	27,144,199	452,722,519
6	DUTA YOSO MULYO	160,685,280	156,000,000	27,144,199	343,829,479
7	MULYO DADI	187,378,320	120,000,000	27,144,199	334,522,519
8	BUMI SARI	187,378,320	120,000,000	27,144,199	334,522,519
9	BATANG HARI	249,711,120	182,400,000	27,144,199	459,255,319
JUMLAH		1,661,758,560	1,488,000,000	244,297,791	3,394,056,351
JUMLAH KESELURUHAN		28,606,648,800	28,456,800,000	3,990,197,253	61,053,646,053

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003